

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Arief, Barda Nawawi. *RUU KUHP Baru: Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro, 2009.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Garnasih, Yenti. *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*. Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016.
- Hariyani, Iswi. *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010.
- Johnstone, Gerry & Daniel W. Van Ness (eds.). *Handbook of Restorative Justice*. Portland: Willan Publishing, 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi revisi. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2008.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edisi ke-9. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Morris, Allison & Gabrielle Maxwell. *Restorative Justice for Juveniles: Conferencing, Mediation and Circles*. Oxford: Hart Publishing, 2001.
- Muladi & Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Edisi revisi. Bandung: Alumni, 2010.
- Mahfud MD, Moh. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Cetakan ke-3. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2010.
- Rahardjo, Satjipto. *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Remmeling, Jan. *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Sutherland, Edwin H. *White Collar Crime: The Uncut Version*. New Haven: Yale University Press, 1983.
- Umbreit, Mark. *The Handbook of Victim Offender Mediation*. San Francisco: Jossey-Bass, 2001.
- Van Ness, Daniel W. & Karen Heetderks Strong. *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice*. 5th ed. New York: Routledge, 2015.
- Zehr, Howard. *Changing Lenses: Restorative Justice for Our Times*. Pennsylvania: Herald Press, 1990; edisi revisi 2015.
- Zehr, Howard. *The Little Book of Restorative Justice*. Revised ed. Pennsylvania: Good Books, 2015.

II. Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Wetboek van Strafrecht (Staatsblad 1915-732) sebagaimana diberlakukan di Indonesia (KUHPidana).

III. Putusan Pengadilan

A. Kasus PT BPR Modern Express Ambon

- Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Amb tanggal 21 Maret 2024.
- Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Amb tanggal 21 Maret 2024.
- Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 69/PID.SUS/2024/PT AMB tanggal 20 Mei 2024.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6848 K/Pid.Sus/2024 tanggal 15 November 2024.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 155 K/Pid.Sus/2025 tanggal 4 Februari 2025.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 643 K/Pid.Sus/2025 tanggal 28 Februari 2025.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 642 K/Pid.Sus/2025 tanggal 28 Februari 2025.

B. Kasus PT BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung

- Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Tanjungkarang tanggal Juli 2009 Perkara Sugiarto Wiharjo alias Alay.

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 510 K/PID.SUS/2014 tanggal 21 Mei 2014.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 253 K/PID.SUS/2012 Perkara Satono.
- Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 11/15/KEP.GBI/2009 tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPR Tripanca Setiadana tanggal 24 Maret 2009.

C. Kasus PT BPR Duta Niaga Pontianak

- Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 450/Pid.Sus/2025/PN Ptk tanggal 6 Februari 2026.
- Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 449/Pid.Sus/2025/PN Ptk tanggal 6 Februari 2026.
- Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 6 Februari 2026 Perkara ZB Direktur Utama PT BPR Duta Niaga Pontianak.
- Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 6 Februari 2026 Perkara DD Direktur Operasional PT BPR Duta Niaga Pontianak.

D. Kasus PT Bank Century Tbk / Robert Tantular

- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1059/Pid.B/2009/PN.Jkt.Pst tanggal 10 September 2009.
- Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 10 Mei 2010 Perkara I atas nama Robert Tantular.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 666/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst Perkara II atas nama Robert Tantular.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1631/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst Perkara III atas nama Robert Tantular.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 210/Pid.B/2013/PN.JKT.PST Perkara IV atas nama Robert Tantular.
- Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 Juni 2020 atas nama Robert Tantular.

E. Putusan Lain yang Dijadikan Rujukan

- Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 432/Pid.B/2021/PN Blb.

IV. Peraturan dan Dokumen Hukum Internasional

Crime and Courts Act 2013, Schedule 17 (United Kingdom): *Deferred Prosecution Agreements*.

De Nederlandsche Bank. *Supervisory Policy on Enforcement and Sanctions*. Amsterdam: DNB, 2022.

United States Department of Justice. Justice Manual, Section 9-28.000: *Principles of Federal Prosecution of Business Organizations*; Section 9-28.1000: Restitution and Remediation. Washington D.C.: DOJ, 2023.

Wet op het financieel toezicht (Wft) [Hukum Pengawasan Keuangan Belanda], Pasal 1:80.

Wetboek van Strafvordering (WvSv) [Hukum Acara Pidana Belanda], Pasal 74.

V. Laporan Resmi dan Dokumen Lembaga

ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO). *ASEAN+3 Regional Economic Outlook 2023*. Singapore: AMRO, 2023.

Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). *Laporan Akhir BPPN 1998–2004*. Jakarta: BPPN, 2004.

Bank Indonesia. *Statistik Perbankan Indonesia: Rasio Kredit terhadap PDB 2023*. Jakarta: BI, 2023.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). *Laporan Penjaminan Simpanan 2022*. Jakarta: LPS, 2022.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). *Laporan Tahunan 2023*. Jakarta: LPS, 2023.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Laporan Tahunan Pengawasan Perbankan 2023*. Jakarta: OJK, 2023.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Siaran Pers: 'Debitur Pelaku Kejahatan Perbankan Bisa Dipidana, OJK Tuntaskan Tipibank BPR Duta Niaga Pontianak' (M. Ismail Riyadi). Jakarta: OJK, 15 Maret 2026.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Statistik Perbankan Indonesia: Kinerja BPR 2019–2023*. Jakarta: OJK, 2023.

Serious Fraud Office (SFO). *Annual Report and Accounts 2021–2022*. London: SFO, 2022.

VI. Jurnal Ilmiah dan Artikel

Kristiawan, Deni. 'Implementasi Perja No. 15/2020 dalam Penanganan Perkara Pidana Ekonomi.' *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 52, No. 1, 2022, hlm. 114–121.

VII. Sumber Berita dan Media Daring

Antara News. 'MA kabulkan PK Robert Tantular dan beri vonis nihil.' 19 Juni 2020. <https://www.antaranews.com>.

CNN Indonesia. 'Kabulkan PK, MA Vonis Terpidana Century Robert Tantular Nihil.' 19 Juni 2020. <https://www.cnnindonesia.com>.

Info Maluku News. 'Persidangan Kasus PT BPR Modern Express, Keterangan Saksi Ringankan 4 Direksi.' 22 November 2023.

Ini Lampung. 'Pekan Depan, Sidang Praperadilan TPPU Bank Tripanca Rp119 M Mulai Digelar.' 11 Mei 2026. <https://www.inilampung.com>.

Kompas.com. 'Debitur Bank Dipidana, OJK Ungkap Kasus Kredit Fiktif di BPR Duta Niaga Pontianak.' 15 Maret 2026. <https://money.kompas.com>.

LaskarMaluku.com. 'Karyawan BPR Gelapkan Dana Perusahaan, Sejumlah Nasabah Tarik Uang Tabungan.' 28 Maret 2023.

Maluku Terkini. 'Jaksa Eksekusi 4 Terpidana Penggelapan Uang BPR Modern Express.' 16 Juni 2025.

RRI. 'Sidang PT BPR Modern Express, Tim Audit Temukan 68 Transaksi Mencurigakan.' 23 November 2023. <https://www.rri.co.id>.

Siwalima News. 'Gelapkan Uang Bank Modern, Sultan Talaga Raja Dihukum 5 Tahun Bui.' 22 Maret 2024.

Stabilitas.id. 'OJK Tuntaskan Tipibank BPR Duta Niaga: Debitur dan Direksi Masuk Penjara.' 16 Maret 2026. <https://www.stabilitas.id>.

Tempo.co. 'Kronologi Aliran Rp 6,7 Triliun ke Bank Century.' 14 November 2009. <https://www.tempo.co>.

Teras Lampung. 'Alay Kabur Lagi? Inilah Kronologi Kasus Bank Tripanca dan Korupsi APBD Lampung Timur.' Oktober 2025.

Tribun Maluku. 'Kasus BPR Modern Sampai Ke Jaksa.' 21 Oktober 2023.